

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Abdullah, Rozali, *Hukum Kepegawaian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Aisyah, Siti Herini, *Buku Ajar Hukum Kepegawaian Universitas Airlangga*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009.
- Asyhadie, Zaeni, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Djojodirjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Haris, Syamsuddin, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Hartini, Sri, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Komisi Pemilihan Umum, *Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilu*, Jakarta, Maret 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Naning, Ramadlon, *Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja tentang Waktu Kerja, Istirahat, dan Upah Lembur*, Hanindita, Yogyakarta, 1982.

Saleh, *et al.*, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017.

Sodikin, *Hukum Pemilu : Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014.

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Pamungkas, Sigit, *Perihal Pemilu*, Laboraturium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009.

Projudikoro, R. Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1994.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

### **Jurnal**

Benuf, Kornelis, “Harmonisasi Hukum : Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 6, Edisi II, Agustus 2019.

Bimasakti, Muhammad Adiguna, “*Onrechtmatig Overheidsdaad* Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 1, Nommor 2, Agustus 2018.

Hanafi, Muhammad, “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2013.

Hasibuan, Putra Halomoan, “Tinjauan Yuridis tentang Upaya-Upaya Hukum”, *Yurisprudensia*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2015.

Herawati, Ratna, Novira Maharani Sukma, dan Untung Dwi Hananto, “Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 4, Nomor 3, 2018.

Iksan, Muchamad, “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)”, *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 11, Nomor 01, Februari-Juli 2017.

- Kalia, Hariati, "Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Volume 1, 2013.
- Nasir, Gamal Abdul, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Hukum Replik*, Volume 5, Nomor 2, September 2017.
- Pratiwi, Yesi Eka dan Sunarso, "Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) dalam Membentuk Iklim Akademik Positif di Prodi PPKN FKIP UNILA", *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 20, Nomor 3, November 2018.
- Prayogo, Sedyo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III, Nomor 2, Mei-Agustus 2016.
- Rifa'I, Tsalis, "Komunikasi dalam Musyawarah (Tinjauan Konsep Asyura Dalam Islam)", *Channel*, Volume 3, Nomor 1, April 2015.
- Sejati, Sidiq Budi dan Dewi Sendhikasari D., "Jaminan Pemerintah terhadap Anggota KPPS dalam Pemilu Serentak 2019", *Info Singkat*, Volume XI, Nomor 09/I/Puslit, Mei 2019.

### **Skripsi**

- Dyah Dewi Hastuti, *Hubungan antara Lama Kerja dengan Kelelahan pada Pekerja Konstruksi di PT. Nusa Raya Cipta Semarang*, **Skripsi**, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015.

### **Media Masa**

- Agregasi Solopos, Jurnalis, "Cerita Anggota KPPS Solo, dari Kerja 24 Jam Nonstop hingga Dirawat di IGD", News Okezone (*online*), 22 April 2019, <https://news.okezone.com/read/2019/04/22/606/2046370/cerita-anggota-kpps-solo-dari-kerja-24-jam-nonstop-hingga-dirawat-di-igd>.
- CNN Indonesia, "Kerja 24 Jam, Petugas KPPS di Surabaya Meninggal Dunia", CNN Indonesia (*online*), 25 Mei 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/>

[20190425164828-20-389650/kerja-24-jam-petugas-kpps-di-surabaya-meninggal-dunia.](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190625174959-20-406344/tim-ugm-penyebab-kematian-kpps-diy-beban-kerja-dan-penyakit)

CNN Indonesia, “Tim UGM : Penyebab Kematian KPPS DIY Beban Kerja dan Penyakit”, CNN Indonesia (online), 25 Juni 2019, h 1, [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190625174959-20-406344/tim-ugm-penyebab-kematian-kpps-diy-beban-kerja-dan-penyakit.](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190625174959-20-406344/tim-ugm-penyebab-kematian-kpps-diy-beban-kerja-dan-penyakit)

Gatra, Sandro, “Data Kemenkes: 527 Petugas KPPS Meninggal, 11.239 Orang Sakit”, *Kompas.com* (online), 16 Mei 2019, [https://nasional.kompas.com/read/2019/05/16/17073701/data-kemenkes-527-petugas-kpps-meninggal-11239-orang-sakit.](https://nasional.kompas.com/read/2019/05/16/17073701/data-kemenkes-527-petugas-kpps-meninggal-11239-orang-sakit)

Wardah, Fathiyah, “Komnas HAM: Negara Abai terhadap Perlindungan Kesehatan Petugas KPPS”, VOA (online), 21 Mei 2019, [https://www.voaindonesia.com/a/komnas-ham-negara-abai-terhadap-perlindungan-kesehatan-petugas-kpps/4926392.html.](https://www.voaindonesia.com/a/komnas-ham-negara-abai-terhadap-perlindungan-kesehatan-petugas-kpps/4926392.html)

Widiastuti, Vika dan Shevinna Putti Anggraeni, “UGM ; Kematian Petugas Pemilu Diduga karena Kelelahan hingga Depresi”, Suara.Com (online), 9 Mei 2019, [https://www.suara.com/news/2019/05/09/201418/ugm-kematian-petugas-pemilu-diduga-karena-kelelahan-hingga-depresi.](https://www.suara.com/news/2019/05/09/201418/ugm-kematian-petugas-pemilu-diduga-karena-kelelahan-hingga-depresi)

### **Internet**

Asshidiqie, Jimly, “Penegakkan Hukum”, [jimly.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.pdf.](http://jimly.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.pdf)

Hasanah, Sovia, “Cara Hitung Hukum Pembagian Waris Anak Menurut Hukum Islam, Hukum Online.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b7021295093e/cara-hitung-pembagian-waris-anak-menurut-hukum-islam/>, 12 September 2018.

Heriani, Fitri Novia, “Ini besaran santunan bagi anggota KPPS yang Sakit dan Meninggal Dunia”, [hukumonline.com/berita/baca/lt5cc8164ac6479/ini-besaran-santunan-bagi-anggota-kpps-yang-sakit-dan-meninggal-dunia/](http://hukumonline.com/berita/baca/lt5cc8164ac6479/ini-besaran-santunan-bagi-anggota-kpps-yang-sakit-dan-meninggal-dunia/), 30 April 2019.

Hutomo, Dimas, “Contoh Kesengajaan dan Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas”, [hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5be8116c61d90/contoh-kesengajaan-dan-kelalaian-dalam-kecelakaan-lalu-lintas/](http://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5be8116c61d90/contoh-kesengajaan-dan-kelalaian-dalam-kecelakaan-lalu-lintas/), 23 November 2018.

Mardatillah, Aida, “Aturan Pemilu Serentak di Uji ke MK”, [hukumonline.com/berita/baca/lt5cd683cff2c62/aturan-pemilu-serentak-diuji-ke-mk/](http://hukumonline.com/berita/baca/lt5cd683cff2c62/aturan-pemilu-serentak-diuji-ke-mk/), 11 Mai 2019.

Purnamasari, Irma Devita, “Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUHPerdata”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata/>, 14 Desember 2012.

Tobing, Letezia, “Adakah Ukuran Kelalaian dalam Hukum Pidana?”, [hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51d592cf9865d/adakah-ukuran-kelalaian-dalam-hukum-pidana/](http://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51d592cf9865d/adakah-ukuran-kelalaian-dalam-hukum-pidana/), 8 Juli 2019.

### **Sumber Lain-lain**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 125.10.6/HK..03.2-Kpt/02/Kota/III/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan di Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya untuk Pemilihan Umum tahun 2019.

Surat Edaran KPU RI Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Surat Kementrian Keuangan No S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2019 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak.